

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan prostitusi online di Ditkrimsus Polda Jateng, hambatan dalam kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan prostitusi online di Ditkrimsus Polda Jateng dan kebijakan penegakan hukum pidana yang seharusnya dilaksanakan untuk menanggulangi prostitusi online di Kepolisian Republik Indonesia

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosilogis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analitis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Permasalahan dianalisis menggunakan Teori Hukum Progresif, Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektifitas.

Kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *prostitusi online* di Ditkrimsus Polda Jateng telah sesuai dengan aturan yang ada, dengan bukti kasus yang ada di wilayah hukum Polda Jateng tersangka Fajar Tri Wibowo dapat disangkakan dengan pasal 45 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*. Hambatan dalam kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *prostitusi online* di Ditkrimsus Polda Jateng dan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Menurut Penulis lakukan penelitian dengan mewancarai anggota Krimsus Polda Jateng, bahwa Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *prostitusi* secara *online* di Wilayah Hukum Polda Jateng adalah sebagai berikut: Kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal, Adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana dan Kasus sangat sedikit yang sampai persidangan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *prostitusi online* di wilayah hukum Polda Jawa Tengah antara lain dengan membangun kemitraan dengan masyarakat secara luas, meningkatkan sarana dan fasilitas dan untuk anggota seharusnya di beri pelatihan-pelatihan khusus yang berhubungan tentang penyidikan terhadap tindak pidana *prostitusi online*, sehingga para pelaku tidak lolos dari UU No. 19 Tahun 2016 dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*. Kebijakan penegakan hukum pidana yang seharusnya dilaksanakan untuk menanggulangi *prostitusi online* di Kepolisian Republik Indonesia, menurut penulis seharusnya semua orang yang berhubungan dengan tindak pidana *prostitusi online* harus di tindak tanpa kecuali, sehingga bisa mengurangi adanya tindak pidana *prostitusi online*

Kata-kata kunci : Kebijakan, Penegakan, Hukum Pidana, Penanggulangan, *Prostitusi*

## ABSTRACT

This study aims to determine and analyze criminal law enforcement policies in efforts to tackle online prostitution in Central Java Regional Police Ditkrimsus, obstacles in criminal law enforcement policies in efforts to tackle online prostitution in Central Java Regional Police Ditkrimsus and criminal law enforcement policies that should be implemented to combat online prostitution in the Police Republic of Indonesia.

The approach method used is normative juridical and sosilogis juridical method, the specifications in the study are analytical descriptis, population and sampling methods are all objects or all symptoms or all events or all units to be examined, data collection techniques using literature studies and interviews, data analysis used is qualitative. Problems were analyzed using Progressive Legal Theory, Law Enforcement Theory and Effectiveness Theory.

Criminal law enforcement policies in efforts to tackle online prostitution in the Central Java Police Ditkrimsus are in accordance with existing regulations, with evidence of cases in the jurisdiction of the Central Java Regional Police suspect Fajar Tri Wibowo can be prosecuted under article 45 paragraph 1 of Law No. 19 of 2016 and Electronic Transactions and or article 30 of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. Obstacles in criminal law enforcement policies in efforts to tackle online prostitution in the Central Java Police Ditkrimsus and solutions to overcome these obstacles. According to the author, do research by interviewing members of Central Java Regional Police Crimsus, that obstacles in law enforcement against criminal acts of prostitution online in the Central Java Regional Police Area are as follows: Public legal awareness is not optimal, There are limitations in facilities and infrastructure and very few cases up to the judge. Efforts made to overcome obstacles in law enforcement against criminal acts of prostitution online in the law area of the Central Java Regional Police include by building partnerships with the wider community, improving facilities and facilities and for members should be given special training related to the investigation of acts online prostitution crime, so that the perpetrators do not escape Law No. 19 of 2016 and Electronic Transactions and or article 30 of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. The criminal law enforcement policy that should be implemented to deal with online prostitution in the Republic of Indonesia National Police, according to the author, all people related to online prostitution should be carried out without exception, so as to reduce the existence of online prostitution crime.

Key words: Policy, Enforcement, Criminal Law, Countermeasures, Prostitution